

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada pelaksanaan otonomi daerah saat ini pemerintahan daerah memiliki kewenangan mengatur dan menjalankan pemerintahannya termasuk di dalamnya kewenangan untuk menjalankan roda perekonomiannya sendiri. Kewenangan yang dimiliki pemerintah dalam mengatur perekonomian tertuang dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang keuangan daerah dimana undang-undang tersebut menjadi landasan dalam menjalankan perekonomian di daerah. Pada saat ini, Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tersebut telah mengalami revisi, sehingga dengan berlakunya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 sebagai hasil revisi telah memberikan kesempatan yang baik pada masyarakat di daerah. Pemerintah dituntut untuk menggali, mengelola dan mengembangkan potensi yang ada di daerah guna meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang baik kepada masyarakat.

Roda perekonomian dilakukan untuk meningkatkan perekonomian daerah tersebut. Secara umum, pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kerjasama untuk meningkatkan

suatu lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi di dalam daerah tersebut.¹

Menyadari akan banyaknya pelimpahan kewenangan yang diberikan serta menyadari akan keterbatasannya maka Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan perubahan paradigma yang dikenal dengan paradigma baru. Perubahan mendasar dari paradigma baru adalah bahwa pembangunan harus dilaksanakan oleh 3 (tiga) komponen utama yaitu unsur masyarakat, swasta, dan pemerintah. Oleh karena itu hal yang mutlak harus dilaksanakan adalah pemberdayaan masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan. Penerapan otonomi daerah mestinya dapat diharapkan membawa semangat perubahan dalam mewujudkan tujuan pembangunan yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Namun karena sifatnya masih relatif baru maka wajar apabila masih banyak dijumpai kendala.

Menyikapi kondisi tersebut diperlukan visi bersama yang mengarah kepada tindakan yang penuh kehati-hatian dan sikap arif dari semua pihak yang mempunyai tugas dan kewenangan dalam menentukan jalannya pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Bantul, termasuk di dalamnya masyarakat yang diharapkan dapat lebih berperan sebagai subyek dalam pelaksanaan pembangunan.

Berkenaan dengan kondisi tersebut pemerintah Kabupaten Bantul dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah memerlukan sebuah kebijakan sebagai petunjuk (*guidance*), penentu arah, sasaran dan tujuan, serta

dengan tata cara bagaimana pemerintahan dan pembangunan yang akan dilakukan.

Disadari bersama bahwa tujuan utama pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mewujudkannya tentu saja harus dilaksanakan dengan tahapan-tahapan pembangunan sejalan dengan dinamika kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Tahapan yang dimaksud tertuang dalam perencanaan strategis (*RENSTRA*) yang disusun untuk kurun waktu selama 5 (lima) tahun ke depan. Pelaksanaan pembangunan yang tertuang dalam Renstra tidak akan berjalan dengan baik apabila hanya bergantung pada pemerintah saja. Hal ini sangat terkait dengan terbatasnya sumber dana pemerintah daerah sebagai penggerak roda pembangunan. Menyadari akan hal itu maka pemerintah Kabupaten Bantul dengan paradigma barunya terus berupaya meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam semua proses kegiatan pembangunan, dengan jalan melibatkan masyarakat sejak dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, sampai dengan pemeliharaan (*pasca konstruksi*). Perencanaan strategis pembangunan yang melibatkan 3 (tiga) pilar utama yaitu tokoh masyarakat, swasta, dan birokrat (*pemerintah*), disusun dan berpijak pada kondisi, potensi, dan permasalahan yang ada serta harus berpihak pada kebutuhan masyarakat. Keberpihakan kepada rakyat tersebut dituangkan dalam cita-cita luhur yang dikenal dengan visi. Berkenaan dengan permasalahan tersebut di atas maka diperlukan sebuah kebijakan bersama sebagai penentu arah dalam mencapai tujuan dan sasaran serta dengan cara bagaimana pemerintahan dan pembangunan akan dilakukan. Kebijakan itu diwujudkan

rencana strategis (*RENSTRA*) yang akan diterapkan pada tahun 2001 sampai 2005.²

Maka dari itulah peran serta pemerintah khususnya pemerintah daerah sangat diperlukan dalam meningkatkan perekonomian guna meningkatkan pendapatan daerahnya dan mencapai kesejahteraan rakyatnya. Dalam hal ini salah satu instansi yang terkait di dalamnya yaitu Dinas Perindagkop. Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Koperasi Kabupaten Bantul mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi umum pemerintah di bidang perindustrian dan perdagangan koperasi dan penanaman modal, selain hal tersebut berdasarkan hasil Rencana Strategis yang dituangkan dalam Perda No. 28 tahun 2001, kebijakan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan prioritas meningkatkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan guna pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pengembangan industri diarahkan pada industri manufaktur, dengan memperluas jaringan perdagangan, memperpendek jaringan distribusi dan memperlancar keberadaan bahan baku khususnya untuk industri kecil dan menengah yang diarahkan untuk memanfaatkan dan membangun keunggulan lokal.

Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Perindagkop berusaha untuk menata dan mengelola aspek yang berhubungan dengan sumber daya yang ada pada Kabupaten Bantul terutama dalam menangani usaha kecil menengah merupakan pertimbangan logis untuk dikembangkan sebagai salah satu sektor andalan, ini terlihat dari adanya potensi di Kabupaten Bantul seperti potensi

² Rencana strategis kabupaten bantul, 2001-2005.

industri, potensi perdagangan, potensi koperasi, dan potensi penanaman modal, ini nampak dengan banyaknya unit-unit usaha kecil menengah yang bergerak di bidang industri, kebanyakan industri di Kabupaten Bantul didominasi oleh industri kerajinan, seperti kerajinan kayu (mebel), kerajinan keramik (gerabah), kerajinan kulit, kerajinan anyaman dari bambu, relief dari batu dan masih banyak kerajinan-kerajinan yang lain, yang memiliki peluang untuk berkembang karena memiliki potensi bagi pemasaran produknya untuk kebutuhan masyarakat di daerah maupun pasar internasional yang kini sudah mulai melirik produk-produk kerajinan di Kabupaten Bantul (Yogyakarta). Masalah yang timbul karena masih lemahnya kewirausahaan pelaku UKM dalam menghadapi persaingan di era globalisasi baik di tingkat lokal dan internasional sehingga perlu adanya keterlibatan Dinas Perindagkop dalam membantu dan mengoptimalkan serta menumbuhkembangkan unit-unit industri kecil menengah pada saat ini dan masa yang akan datang melalui strategi yang dilakukan oleh Dinas Perindagkop. Hal ini dapat dilihat dari Dinas Perindagkop Kabupaten Bantul selaku penggerak utama dalam mengembangkan usaha kecil menengah.

Sebagaimana yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 silam ketika krisis ekonomi melanda negara kita. Sendi-sendi perekonomian Indonesia runtuh, pembangunan yang telah dicapai sejak Indonesia merdeka hancur tanpa ada yang tersisa. Keadaan ini menyebabkan banyak usaha gulung tikar baik dari usaha kecil hingga industri yang berskala besar. Tidak terhitung lagi berapa besar beban yang harus ditanggung oleh masyarakat akibat krisis tersebut. Tidak

unit usaha kecil menengah yang ada di Kabupaten Bantul

Created with

sendiri pada saat ini memiliki unit-unit usaha kecil yang menggerakkan roda perekonomian, namun pada kenyataannya untuk saat ini unit-unit usaha kecil menengah tersebut masih belum mampu mengoptimalkan pengembangan dan menjalankan usahanya.

Adapun kendala-kendalanya, tidak kompeten dalam manajerial. Tidak kompeten atau tidak memiliki kemampuan mengelola usaha, kurang berpengalaman baik dalam kemampuan teknik, kemampuan memvisualisasi usaha, kemampuan mengkoordinasikan, kemampuan mengelola sumber daya manusia, maupun kemampuan mengintegrasikan operasi perusahaan, kurang dapat mengendalikan keuangan, kekeliruan dalam memelihara aliran kas akan menghambat operasional perusahaan dan mengakibatkan perusahaan tidak lancar. Gagal dalam perencanaan maka akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaan. Lokasi yang tidak strategis dapat mengakibatkan perusahaan sukar beroperasi karena kurang efisien. Kurangnya pengawasan peralatan yang berkaitan erat dengan efektivitas dan efisiensi sehingga mengakibatkan penggunaan alat tidak efektif dan efisien. Sikap yang kurang bersungguh-sungguh dalam berusaha yang mengakibatkan usaha yang dilakukan menjadi labil dan gagal. Ketidakmampuan dalam melakukan peralihan/transisi kewirausahaan. Wirausaha yang kurang siap menghadapi dan melakukan perubahan, tidak dapat menjadi wirausaha yang berhasil.³

Selain faktor kegagalan diatas, ada beberapa potensi yang membuat seseorang mundur dari kewirausahaan yaitu karena, Pendap

³ Norman M. Scarborough, Dalam Bukunya, Zimmerer. W.Thomas, 1996, *Et*
the New Venture Formation, New Jersey: Prentice Hall International, Inc. hal

menentu, baik pada tahap awal maupun pada tahap pertumbuhan, dalam bisnis tidak ada jaminan untuk terus memperoleh pendapatan yang berkesinambungan. Dalam wirausaha, sewaktu-waktu bisa rugi dan sewaktu-waktu juga bisa untung. Kondisi yang tidak menentu dapat membuat seseorang mundur dari kegiatan berwirausaha. Kerugian akibat hilangnya modal investasi dan tingkat kegagalan bagi usaha baru sangatlah tinggi.

Perlunya kerja keras dan waktu yang lama membuat wirausaha biasanya bekerja sendiri mulai dari pembelian, pengelolaan, penjualan, dan pembukuan. Waktu yang lama dan keharusan bekerja keras dalam berwirausaha mengakibatkan orang yang akan menjadi wirausaha menjadi mundur, karena kurang biasa menghadapi tantangan. Wirausaha yang berhasil pada umumnya menjadikan tantangan sebagai peluang yang harus dihadapi dan ditekuni. Kualitas kehidupan yang tetap rendah meskipun usahanya mantap dan kualitas kehidupan yang tidak segera meningkat dalam usaha, akan mengakibatkan orang mundur dari kegiatan berwirausaha.⁴

Maka dari itu Pemerintah Bantul melalui Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi sebagai unsur pelaksanaan pemerintah daerah yang mengurus berbagai macam masalah perdagangan, dan perindustrian, mempunyai kewenangan untuk membuat rencana strategis dalam upaya pengembangan unit-unit usaha kecil yang ada di Kabupaten Bantul, sebab dinas ini merupakan instansi pemerintah yang mengurus sektor industri.

⁴ Norman M. Scarborough, Dalam Bukunya, Zimmerer, W. Thomas 1996, *En*
The New Venture Formation, New Jersey: Prentice Hall International Inc. hal

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang dikemukakan dapat ditarik perumusan suatu masalah sebagai berikut :”Bagaimana strategi Dinas Perindakop Kabupaten Bantul dalam upaya pengembangan Usaha Kecil Menengah tahun 2004?”.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui strategi apa yang harus dilakukan oleh Dinas PERINDAGKOP Kabupaten Bantul dalam mengembangkan Usaha Kecil Menengah.

b. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yaitu memberikan masukan atau sebagai input bagi Dinas Perindagkop dan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam menjalankan pengembangan Usaha Kecil Menengah, penelitian ini dapat juga digunakan untuk menambah referensi di bidang karya ilmiah guna mengembangkan ilmu pengetahuan secara umum.

D. Kerangka Dasar Teori

Kerangka dasar teori merupakan uraian yang menjelaskan variabel-variabel dan hubungan antara variabel berdasarkan konsep/definisi tertentu, sehingga akan nampak jelas sistematis dan ilmiah dalam melakukan penelitian.

Unsur yang sangat penting dalam penelitian adalah teori, sebab teori mampu

Menurut Koentjaraningrat:

Teori merupakan pernyataan mengenai sebab akibat atau mengenai adanya hubungan positif antara gejala-gejala yang diteliti dengan satu/beberapa faktor tertentu dalam masyarakat.⁵

Kerangka teori ini dapat memberikan gambaran dalam menganalisa tentang strategi pemerintah terhadap Usaha Kecil Menengah.

1. Strategi

a. Pengertian Strategi

Strategi menurut Solusu:

Suatu seni menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai sasaran melalui hubungan yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan⁶.

Strategi menurut Ibnu Syamsi:

Kebijakan menyeluruh dan lebih ditekankan pada kebijakan eksternal terdapat ancaman dan peluang dari luar yang bersifat makro dan mikro⁷.

Strategi menurut Ulung Pribadi:

Merupakan rencana terpadu dan menyeluruh mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan, program oprasional, dan keadaan lingkungan yang dihadapi⁸.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, rencana strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar dapat menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, dan global dan dapat berada dalam tatanam sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

⁵ Koentjoroningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia Jakarta.

⁶ Sumitro Djojohadikusuma, *Teori Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, P1 Djakarta, 1987, hal 509.

⁷ Ibnu syamsi, *Catatan Kuliah Manajemen Proyek*.

⁸ Ulung Pribadi, *Manajemen Strategis*, Gramedia Jakarta.

Lebih lanjut strategi adalah rencana untuk mencapai tujuan tertentu yang disusun sedemikian rupa oleh suatu organisasi sesuai dengan misi yang hendak diraihnya dengan mempertimbangkan pengaruh faktor-faktor lingkungan eksternal maupun internal.

Setiap organisasi mempunyai strategi, karena tentu saja untuk mewujudkan tujuan-tujuannya, organisasi harus mempunyai rencana kegiatan. Strategi organisasi tampak pada pola-pola tujuannya, kebijakannya, program-programnya, kegiatan, keputusan dan pengalokasian sumber dayanya. Suatu strategi yang efektif harus memenuhi beberapa kriteria seperti:⁹

- 1) Strategi secara teknis harus dapat dijalankan.
- 2) Strategi secara politis harus dapat diterima oleh para *key stakeholders*.
- 3) Strategi harus sesuai dengan filosofi dan nilai-nilai organisasi.
- 4) Strategi harus sesuai dengan isu strategis yang hendak dipecahkan.

Seperti dikemukakan sebelumnya, bahwa strategi bagi suatu organisasi merupakan alat untuk meraih tujuan sementara dalam konsep sistem, organisasi terdiri dari sub-sub sistem yang kecil yang masing-masing mempunyai tujuan khusus, sehingga terdapat tingkatan-tingkatan tujuan tertentu, yaitu tujuan menyeluruh organisasi dan tujuan inkremental sub-sub sistem. Yang tentunya masing-masing memerlukan strategi pencapaiannya.

b. Ciri- Ciri Utama Strategi¹⁰

1) Ufuk waktu (*time horizon*)

Istilah strategi digunakan untuk menerangkan aktifitas-aktifitas yang mencakup sebuah ufuk waktu yang diperluas dengan memperhatikan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan aktifitas-aktifitas dan waktu yang diperlukan guna mengobservasi dampaknya.

2) Dampak (*impact*)

Sekalipun konsekuensi-konsekuensi mengikuti strategi tertentu akan menjadi jelas untuk jangka waktu lama.

3) Pemusatan upaya (*concentration to effort*)

Sebuah strategi yang efektif biasanya memerlukan pemusatan aktifitas, upaya atau perhatian terhadap sejumlah tujuan relatif sempit. Upaya memusatkan perhatian atas aktifitas-aktifitas terpilih tersebut secara implisit mengurangi sumber daya yang tersedia untuk aktifitas-aktifitas yang lain.

4) Pola-pola kepusatan (*the pattern of decision*)

Walaupun perusahaan tertentu hanya mengambil beberapa keputusan dalam upaya mengimplementasikan strategi yang dipilih mereka kebanyakan strategi diharuskan diambilnya suatu jenis-jenis kepentingan terhenti dengan berlangsungnya waktu.

¹⁰ Robert H. Mays dan Steven C. W. dalam Prof. Dr. Winardi, SE, Strategi Dan

5) Daya tembus (*pervasiveness*)

Sebuah strategi mencakup spektrum luas aktifitas-aktifitas yang berkisar sekitar proses-proses pengalokasian sumber daya.

Dari beberapa keterangan diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa strategi pengembangan UKM adalah kesatuan rencana yang komprehensif dan terpadu untuk menjadikan UKM sebagai perekonomian kerakyatan.

c. Manfaat Manajemen Strategi

Organisasi menyelenggarakan manajemen strategi karena beberapa hal. Dengan adanya manajemen strategi diharapkan dapat membantu Dinas Perindagkop Kabupaten Bantul untuk menjalankan program-program yang telah ditentukan khususnya dalam bidang UKM sehingga dapat memberi hasil sesuai dengan apa yang telah ditargetkan oleh dinas tersebut. Adapun manfaat dari manajemen strategis, yaitu:¹¹

- 1) Berfikir secara strategis dan mengembangkan strategi-strategi yang efektif.
- 2) Memperjelas arah masa depan.
- 3) Menciptakan prioritas.
- 4) Membuat keputusan sekarang dengan mengingat konsekuensi masa depan.
- 5) Mengembangkan landasan yang koheren dan kokoh bagi pembuatan keputusan.

¹¹ Idris M. Ruslan, *Perencanaan Strategi Bagi Organisasi Sosial*, Pustaka Dala

- 6) Menggunakan keleluasaan yang maksimum dalam bidang-bidang yang berada di bawah kontrol organisasi.
- 7) Membuat keputusan yang melintasi tingkat dan fungsi.
- 8) Memecahkan masalah utama organisasi.
- 9) Memperbaiki kinerja organisasi.
- 10) Menangani keadaan yang berubah dengan cepat secara efektif.
- 11) Membangun kerja kelompok dan keahlian.

Manajemen organisasi dapat berfungsi sebagai sarana mengkomunikasikan tujuan perusahaan dan jalan yang hendak ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut kepada pemilik eksekutif, karyawan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Mereka diharapkan memiliki sikap yang proaktif dalam menyikapi perubahan lingkungan bisnis tidak sekedar reaktif. Dengan demikian, mereka memiliki persiapan yang lebih dari cukup untuk mengantisipasi dan mengeksplorasi peluang bisnis yang muncul.

Penyusunan manajemen strategi haruslah dilihat sebagai usaha untuk mengetahui sedini mungkin kekuatan dan kelemahan perusahaan agar perusahaan mampu bertahan (*survive*) menghadapi perubahan lingkungan bisnis yang terus menerus.

d. Tahap-tahap Manajemen Strategi

Mengingat perumusan langkah strategi penelitian ini menggunakan model manajemen strategi, maka dalam menganalisa data digunakan urutan proses analisis yang mengacu pada model tersebut yang dal:

dalam beberapa tahapan proses sebagai berikut

1. Perumusan Strategi

Pada tahap ini, suatu organisasi dituntut untuk melakukan analisa faktor eksternal dan internal yang dimilikinya, agar nantinya pada saat pelaksanaannya hambatan dan peluang yang ada dapat di hindari atau dimanfaatkan sebaik mungkin.

*“Perumusan strategi termasuk mengembangkan misi bisnis, mengenali peluang-peluang dan ancaman eksternal perusahaan, menetapkan kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan obyektiif jangka panjang, menghasilkan strategi alternatif dan memilih strategi tertentu untuk dilaksanakan”.*¹²

Dalam perumusan strategi ini pula, pihak organisasi dapat menggunakan sebagian kesempatan untuk menentukan langkah penting bagi organisasi, termasuk langkah yang menguntungkan bagi organisasi. Tahap ini dapat pula digunakan sebagai perumusan strategi alternatif, sebagai suatu jalan lain seandainya strategi utama mengalami hambatan, sehingga organisasi dapat berjalan secara berkelanjutan, tanpa berhenti karena munculnya hambatan dari faktor internal dan eksternal organisasi.

2. Implementasi Strategi

Merupakan tahapan untuk melakukan tindakan dari suatu manajemen strategis. Pada tahap ini, semua strategi yang telah disusun mulai diterapkan dalam organisasi, termasuk penentuan kebijakan yang akan diambil. Karena strategi yang telah dibuat atau disusun namun tidak segera dilaksanakan adalah tidak berguna sama sekali. Tahap ini juga merupakan tahap yang sulit dalam suatu manajemen

disiplin personil, komitmen, dan pengorbanan, mutlak diperlukan agar strategi dapat dilaksanakan. Keberhasilan implementasi strategi tergantung pada kemampuan manajer untuk memotivasi karyawan, yang lebih merupakan seni ketimbang pengetahuan. Di sisi lain, hubungan antar pribadi amat penting demi keberhasilan strategi, karena pelaksanaan strategi tersebut akan berpengaruh terhadap para karyawan dan manajer dalam suatu organisasi. Salah satu tantangan dalam pelaksanaan strategi ini adalah untuk merangsang para manajer dan karyawan dalam organisasi untuk bekerja dengan bangga untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

3. Evaluasi Strategi

Pada tahap ini digunakan untuk mengetahui strategi yang tidak dapat berjalan secara maksimal, sekaligus untuk melakukan koreksi. Untuk itulah diperlukan informasi tentang kegagalan strategi sekaligus faktor yang berpengaruh didalamnya. Untuk menghindari terulangnya kegagalan strategi tersebut, maka strategi dapat dirancang ulang agar dimasa mendatang strategi tersebut dapat disesuaikan dengan faktor internal dan eksternal organisasi. Untuk melakukan evaluasi strategi ada tiga tahapan:

- a. Meninjau faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar

- b. Mengukur prestasi.
- c. Mengambil tindakan korektif.¹³

Evaluasi strategi mutlak dilakukan agar tujuan organisasi dapat tercapai. Jika evaluasi ini terus dilakukan maka organisasi tersebut akan dapat semakin berkembang dan maju, karena organisasi telah memahami faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi kinerjanya. Ini tentunya akan berbeda dengan organisasi yang terlalu cepat puas dengan hasil yang telah dicapainya saat ini. Karena organisasi tersebut tidak dapat melakukan perkiraan di masa depan dan segera melakukan persiapan untuk hal tersebut.

Terkait dengan tahapan dalam manajemen strategis tersebut, menekankan pada tahap implementasi strategi dan kebijakan yang telah dirumuskan. Karena pihak menentukan baik buruknya suatu organisasi selain pihak organisasi, pihak eksternal organisasi (masyarakat) turut menentukan. Sebagai imbal baliknya pihak publik akan terus memberikan masukan kepada organisasi agar dimasa mendatang dapat dihasilkan kebijakan yang lebih baik.

4. Penilaian eksternal

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pada pengamatan lingkungan eksternal dari organisasi akan terdapat dua hal yang pantas untuk dipahami demi keberadaan organisasi itu yaitu kesempatan dan ancaman. Kedua hal itu merupakan bagian dari fakt

¹³ Fred P. David, *Manajemen Strategi*, Penerbit Andi Yogyakarta, 2002, hal 6

organisasi yang disingkat SWOT (*Strength* atau kekuatan, *Weakness* atau kelemahan, *Opportunity* atau kesempatan atau peluang, *Threaths* atau ancaman)

Pada kesempatan dan ancaman kerap menjadi masalah yang membayangi suatu organisasi, terutama organisasi yang bergerak dibidang usaha, baik produk barang atau jasa. Ancaman dan kesempatan akan selalu ada sepanjang organisasi tetap ada dan memiliki cara tersendiri untuk mengatasinya. Hal yang turut mempengaruhi munculnya ancaman dan kesempatan adalah *pertama*, lingkungan kerja, yang terdiri dari elemen atau kelompok yang secara langsung berpengaruh atau dipengaruhi oleh operasi-operasi utama organisasi, misal pemerintah atau pesaing. *Kedua*, lingkungan sosial, terdiri atas kekuatan umum, yang tidak berhubungan secara langsung dengan aktivitas jangka pendek organisasi, tetapi dapat dan sering mempengaruhi keputusan jangka panjang. Dalam hal ini bisa berupa kekuatan teknologi, ekonomi, sosiokultural, dan politik hukum.¹⁴

Dari kedua faktor lingkungan inilah kesempatan dan ancaman akan muncul, baik demi kemajuan atau kemunduran organisasi. Kesemuanya kembali pada sistem manajemen yang telah diterapkan. Jika manajemen yang diterapkan benar-benar melihat segi kesempatan dan ancaman, pasti faktor yang berpengaruh atas kondisi organisasi akan diatasi.

5. Penilaian internal

Dalam faktor internal, kelemahan dan kekuatan menjadi faktor yang turut menentukan posisi dan kondisi organisasi, dari sini dapat diketahui sejauh mana kualitas personil dan sistem manajemen yang diterapkan, serta potensi yang dimiliki organisasi yang dimungkinkan untuk memperkuat organisasi serta meminimalkan kelemahan. Perlu adanya upaya untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan organisasi melalui :

- a. Sumber daya (*input*), Dalam hal ini dapat berupa personil yang dimiliki untuk melaksanakan aktivitas organisasi dan dana, untuk biaya operasional organisasi. *Kedua*, komponen ini saling berkaitan, untuk menunjang keberadaan organisasi, dalam menjalankan kegiatan dan pelaksanaan kebijakan, dapat juga dikatakan sebagai bagian pokok dari organisasi. Jika salah satu komponen tidak terpenuhi maka dapat berakibat pada lambatnya kinerja organisasi, bahkan dapat dimungkinkan pasif. Sumber daya berupa personil dapat ditempatkan sebagai pelaksana kebijakan yang diambil organisasi. Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tentunya membutuhkan biaya operasional. Kedua hal tersebut dapat menunjukkan kelemahan atau kekuatan suatu organisasi, baik itu pada sisi finansial atau Sumber Daya Manusia. Karena finansial dan SDM adalah sebuah modal dan aset bagi suatu organisasi. Melalui SDM pula suatu

organisasi dalam menentukan kebijakan yang akan diambil. Serta untuk memperkokoh SDM, ada baiknya SDM itu dilengkapi atau memiliki suatu ketrampilan. Karena keahlian tiap personil dapat memberi nilai lebih pada suatu organisasi. Sedangkan finansial adalah sebagai bagian pendukung dari organisasi, karena organisasi tentunya membutuhkan biaya operasional termasuk didalamnya untuk peningkatan mutu dan nilai SDM.

- b. Strategi sekarang (*proses*), bagian lain untuk menilai kekuatan atau kelemahan organisasi adalah melalui proses atau penentuan strategi. Dalam hal ini adalah melihat sejauh mana suatu organisasi mempersiapkan strategi agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, serta dapat menekan seminim mungkin kegagalan serta untuk mempersiapkan kemungkinan menghadapi para pesaing. Terkait dengan pelaksanaan program organisasi tentunya tidak luput dengan perumusan suatu strategi. Strategi sangat dibutuhkan oleh suatu organisasi, karena strategi sendiri dapat digunakan untuk mengukur kemampuan yang dimiliki organisasi sekaligus sebagai tolok ukur kekuatan dan kelemahan organisasi. Keberadaan strategi juga dimungkinkan untuk membuat suatu kebijakan alternatif bagi organisasi dalam mencapai tujuannya, sehingga upaya atau proses untuk menuju kearah tujuan organisasi tidak hanya mengacu pada satu cara namun dapat melalui cara alternatif lain. Serta

hambatan dalam pelaksanaannya. Jika perumusan strategi itu tepat, maka itu akan menjadi nilai lebih bagi organisasi dan merupakan dukungan moral bagi personil organisasi. Disisi lain hal tersebut dapat menjadikan organisasi menjadi lebih kuat dan semakin optimis dalam membuat kebijakan serta menentukan strategi pada masa yang akan datang.

- c. Kinerja (*Output*), dalam hal ini lebih ditekankan pada pelaksanaan kebijakan setelah suatu organisasi merumuskan suatu strategi maka pada tahap akhir dari hal tersebut adalah pelaksanaan strategi. Semua kinerja yang dilaksanakan organisasi tidak luput dari suatu perumusan strategi, seandainya ada perubahan itu pun termasuk dalam strategi alternatif. Kinerja sendiri sepenuhnya adalah implementasi strategi dan gagasan organisasi atau para personil yang terlibat dalam proses perumusan strategi dalam organisasi, dari hasil kinerja inilah kekuatan dan kelemahan organisasi akan dapat diketahui serta dapat dievaluasi. Mungkin saja pada tahapan perumusan strategi semua berjalan lancar, tapi pada saat pelaksanaannya mengalami kesalahan atau kurang koordinasi. Hal tersebut dapat disebabkan oleh minimnya sosialisasi strategi kepada para personil. Publik melihat organisasi adalah sebagai alat atau sarana untuk mencapai tujuan tertentu sesuai yang ditargetkan organisasi. Apalagi jika organisasi tersebut bergerak dalam bidang layanan barang atau jasa, publik hanya men

jika barang atau jasa tersebut dapat tersedia atau terla

maka organisasi itu tentunya hebat dalam manajemennya, karena dapat segera merespon keinginan publik. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa nilai lebih dari organisasi adalah kemampuan organisasi melaksanakan tugasnya sesuai strategi yang diterapkan untuk mencapai tujuan dengan sebaik mungkin. Untuk lebih lengkapnya organisasi memiliki suatu Sistem Informasi Manajemen (SIM atau *Management Information System*, MIS), karena sistem ini menjadi pokok untuk membangun organisasi. Organisasi dengan sistem MIS yang efektif seharusnya berada dalam proses yang lebih baik untuk menilai kekuatan dan kelemahannya dibanding organisasi tanpa sistem semacam itu.¹⁵ Informasi bagi suatu organisasi sangatlah penting karena informasi inilah nantinya akan diketahui langkah-langkah yang terbaik yang akan diambil untuk jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Tanpa informasi organisasi tidak dapat mengetahui sejauh mana kinerja yang telah dilaksanakan, apakah berhasil atau gagal.

“Ketiadaan relatif informasi kinerja menghadirkan masalah baik bagi organisasi maupun stake holder-nya akan menilai harga organisasi berdasarkan seberapa baik organisasi berbuat terhadap kriteria yang akan mereka gunakan. Bagi stakeholder khususnya, kriteria ini biasanya berkaitan dengan kinerja. Jika organisasi tidak bisa memperlihatkan keefektifannya terhadap kriteria ini maka stakeholder mungkin akan melepaskan dukungannya.”¹⁶

6. Isu-isu Strategis

Dalam hal ini mengandung arti :

“Isu strategis didefinisikan sebagai pilihan kebijakan pokok yang mempunyai mandat, misi, nilai, organisasi, tingkatan dan perpaduan produk atau jasa, klien atau pemakai, biaya, keuangan, organisasi, dan manajemen”.¹⁷

Dalam tahap selanjutnya isu strategis dapat dijadikan bahan untuk membuat kebijakan bagi organisasi, saat menghadapi masalah. Namun dalam penyusunan isu strategis tidak terlepas dari konflik, mengenai hal yang harus dilakukan dalam organisasi dengan kata lain setiap penyusunan isu strategis tidak terlepas dari suatu perhitungan yang matang agar konflik tidak berlarut-larut. Konflik dapat menyatukan orang atau memisahkan mereka.¹⁸

Dalam penyusunan isu strategis terdapat pula dua hal pokok yang harus dipenuhi yaitu *pertama* daftar isu strategis yang dihadapi organisasi itu. *Kedua*, penyusunan isu berdasarkan urutan prioritas, logis dan temporal. Untuk kelengkapan daftar itu disertakan pula suatu informasi.

Penempatan isu strategis sebagai bahan pegangan organisasi dalam pencapaian tujuan bentuk untuk dilakukan, namun dari upaya itu yang tidak boleh dilupakan adalah penataan manajemen beserta perencanaannya. Sehingga pelaksanaan program itu tidak mengalami kegagalan, yang dapat merugikan organisasi.

¹⁷ *Ibid*, hal 161.

¹⁸ *Ibid*, hal 162.

7. Strategi Kebijakan

Dalam suatu organisasi banyak kebijakan yang akan diputuskan, dalam upaya memperlancar kinerja organisasi. Namun tidak jarang kebijakan itu dikeluarkan tanpa melihat kemampuan atau kondisi organisasi. Ada baiknya jika kebijakan itu dianalisa secara mendalam, terutama yang terkait dengan masalah SWOT. Dikhawatirkan jika organisasi itu terlalu memaksakan diri dengan kebijakannya, sedang kondisi organisasi diabaikan akan terjadi bermacam benturan dan konflik. Selain melakukan analisa atas SWOT juga diperlukan analisis lingkungan secara eksternal atau internal. Penilaian itu menghasilkan informasi yang sangat penting bagi kelangsungan dan kemakmuran organisasi.¹⁹

e. Perumusan Strategi

Pada dasarnya strategi merupakan garis besar terhadap tantangan-tantangan mendasar yang dihadapi. Oleh karena itu strategi harus dirumuskan selaras dengan isu strategi yang telah diidentifikasi.dalam. Perumusan strategi peingkatan UKM sebagai berikut :²⁰

- a) Mengidentifikasi alternatif-alternatif umum yang dapat digunakan untuk menjawab isu-isu strategis.
- b) Mempelajari Kendal-kendala yang kemungkinan muncul dalam pelaksanaan alternatif-alternatif umum tersebut.

¹⁹ *Ibid*, hal 140.

²⁰ Isah M. Daman, *Perencanaan Strategi Bagi Organisasi Sosial, Dutaoka, Dala*

- c) Merumuskan usulan-usulan utama yang dapat digunakan untuk mewujudkan alternatif-alternatif tersebut, sekaligus mengantisipasi kemungkinan adanya kendala.
- d) Merumuskan kegiatan utama apa yang dilakukan dalam satu atau dua tahun kedepan.
- e) Merumuskan langkah-langkah khusus yang harus dilakukan dalam enam bulan kedepan dan menetapkan siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya.

2. Pemerintah Daerah

Negara Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Karena itu, pasal 18 Undang-Undang Dasar, antara lain, menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya di tetapkan dengan Undang-Undang.²¹ Dengan demikian Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi dengan memberikan kewenangan yang nyata dan

a. Pengertian Pemerintah Daerah

Menurut Marium, pemerintah dapat didefinisikan menjadi 2 pengertian, yakni:²²

- 1) Pemerintah dalam arti luas adalah segala tugas/ wewenang kekuasaan Negara, apabila kita menggunakan atau mengikuti perbidanggaan Montesque maka pemerintah dalam arti luas adalah bidang-bidang legeslatif, eksekutif dan yudikatif.
- 2) Pemerintah dalam arti sempit diartikan sebagai tugas/ kewenangan kekuasaan khusus dalam bidang eksekutif saja.

Kemudian dia juga menjelaskan pengertian tentang aparatur negara, alat-alat pemerintah dalam arti luas dan sempit sebagai berikut :

- 1) Pemerintah dalam arti luas menunjukkan aparatur negara, alat-alat perlengkapan negara seluruhnya sebagai kesatuan yang melaksanakan seluruh kekuasaan negara/ pemerintahan dalam arti luas.
- 2) Pemerintahan dalam arti sempit menunjukkan pada aparat organisasi atau perlengkapan yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam arti sempit.

Menurut The Liag Gie yang dikutip oleh Masyuri Maschab yang dimaksud pemerintah daerah adalah satuan-satuan organisasi pemerintah yang berwenang menyelenggarakan segenap kepentingan dari sekelompok penduduk yang mendiami suatu wilayah.²³ Sedangkan menurut Masyuri Maschab sendiri yang dimaksud dengan pemerintah daerah:

²² Marium, *Asas-Asas Ilmu Pemerintahan*, Seksi Penerbitan UGM, hal 5, 1979.

²³ Masyuri Maschab, *Pemerintahan di Daerah*, FISIP UGM Yogyakarta, hal 2

aparatur negara yang berwenang memerintah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu, yang berhak dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam lingkungan negara. Jadi yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah organisasi yang memiliki hak, kewenangan dan kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintah didaerahnya.²⁴

b. Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Koperasi

Tugas dan fungsi pokok dari dinas *PERINDAGKOP* berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 49 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Dimas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, Keputusan Bupati Nomor : 155 Tahun 2001 tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas dan Organisasi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi mempunyai Tugas pokok dan fungsi melaksanakan Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten di bidang Perencanaan Pembinaan dan Pengembangan Industri Perdagangan dan Koperasi, dalam artian mendapatkan Perencanaan Strategi (Renstra) yang baik sehingga dapat tersusunnya suatu perencanaan pembangunan dibidang industri perdagangan koperasi dan penanaman modal dengan memperhatikan berbagai faktor intern dan faktor ekstern.²⁵

²⁴ Victor M. Situmorang dan Cormetyna S, *Ilmu Pemerintahan*, Fak. Sospol UC 21, 1976.

²⁵ *Daftar Pokok Daerah Tahun 2001-2005*

3. Usaha Kecil Menengah

a. Pengertian Usaha Kecil Menengah

Seperti yang tertuang dalam UU No. 8 tahun 1984 bahwa industri merupakan kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi, atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih baik untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan.²⁶

b. Macam-macam Perindustrian

Menurut Biro Pusat Statistik, industri terbagi menjadi empat:²⁷

a) Industri Kerajinan

Industri kerajinan rumah tangga termasuk juga dalam kelompok industri kecil dimana karyawannya hanya berkisar 1-19 orang.

b) Industri Kecil.

Tidak jauh berbeda dengan industri kerajinan yang kurang lebih hanya mempunyai sampai dengan 19 orang pekerja.

c) Industri Sedang

Industri yang mempunyai karyawan lebih banyak dari industri kecil sampai dengan kurang dari 100 karyawan.

d) Industri Besar.

Merupakan industri yang mempunyai karyawan lebih dari 100 karyawan.

c. Ciri dan Sifat Industri Kecil

²⁶ Republik Indonesia, Pasal 2 UU No 8 tahun 1984, dalam Ibnu Syamsi, *Eksi Pembangunan*, FISIPOL, UGM, Yogyakarta, 1986, hal 46.

Populasi industri kecil terkonsentrasi pada lokasi tertentu yang merupakan sentral-sentral produksi, adapun ciri dan sifat perajin antara lain:²⁸

- a) Sifat usaha mandiri, rumah tangga dan sebagai usaha tambahan.
- b) Menguasai teknologi produksi dan dibantu oleh anggota keluarga yang tidak dibayar.
- c) Pengadaan bahan baku umumnya tergantung pada pemberian pesanan.
- d) Tidak mempunyai asset pasar dan lembaga keuangan.

Suatu industri dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari sangat terkait oleh beberapa faktor produksi yang satu sama lain sangat terkait. Factor-faktor tersebut adalah:²⁹

- a) Bahan Baku

Bahan pokok atau banda yang akan diolah menjadi bahan jadi yang siap untuk dipasarkan kepada masyarakat melalui beberapa tahapan dalam prosesnya.

- b) Tenaga Kerja

Kekuatan dan kemampuan yang dimiliki oleh manusia untuk dapat melakukan kerja.

- c) Teknologi

Cara atau metode yang digunakan dalam proses produksi untuk membuat barang-barang jadi atau siap pakai.

²⁸ The Kian Wie, *Dialog Kemitraan dan Keterikatan Usaha Besar dan Kecil L Industri Pengolahan*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, 1992, hal 100.

²⁹ Sunarya, *Buku Pengantar Bagi Kader DAK*, Direktorat Duta, Jakarta.

d) Modal

Semua kekayaan yang dapat digunakan langsung untuk segala biaya produksi.

e) Kemampuan Usaha

Memanfaatkan factor kesempatan dengan tujuan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.

f) Pemasaran

Upaya untuk menjual hasil dari proses yang dibuat.

Dalam perkembangan selanjutnya, industri kecil dan industri rumah tangga merupakan pekerjaan pilihan yang menjadi tumpuan bagi masyarakat petani yang berlahan sempit dan para buruh tani. Kegiatan industri ini sudah bukan menjadi pekerjaan sampingan lagi. Karena industri ini sudah menjadi pekerjaan pokok dan sebagai tumpuan penghidupan keluarga yang berarti kedudukan industri ini sudah mengalami pergeseran. Usaha kecil menengah ini kemudian sering dikenal dengan sebutan UKM yang berlingkup kecil dan masih menggunakan teknologi yang masih sederhana.

E. Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional adalah suatu usaha menjelaskan mengenai pembatasan pengertian antara satu konsep yang lain agar tidak terjadi kesalahpahaman definisi konsepsional yang merupakan suatu pengertian

dan gejala yang menjadi pokok perhatian maka berdasarkan peni

beberapa definisi konseptual yang dapat kami berikan di dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.
- 2) Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta dengan perangkatnya sebagai eksekutif daerah untuk menjalankan fungsinya dalam mencapai pengembangan daerahnya.
- 3) UKM merupakan singkatan dari Usaha Kecil Menengah yang berusaha/bergerak dalam sektor informal.

F. Definisi Oprasional

Menurut Saifudin Anwar definisi oprasional adalah bahasa atau definisi suatu variabel agar tidak terjadi ambiguous yaitu memiliki makna ganda atau tidak memasukan indikatornya yang jelas.³⁰

Cara mengukur variabel dengan kata lain definisi oprasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana cara mengukur variabel.

A. Analisis Dinas Perindagkop Terhadap UKM di Kabupaten Bantul

1. Kekuatan dan kelemahan dalam menjalankan manajemen strategi.
2. Peluang dan ancaman dalam menjalankan manajemen strategi.

B. Strategi Dinas Perindagkop Dalam Upaya Pengembangan UKM Tahun 2004

1. Konsep visi dan misi.
2. Analisis SWOT

3. Program Kerja Dinas Perindagkop
4. Aspek peningkatan fisik
 - 1) Pemberian Bantuan Dana
 - 2) Pemberian Bantuan Peralatan Teknis
5. Aspek peningkatan non fisik
 - 1) Pembinaan dan Penyuluhan Tentang Teknologi Maju
 - 2) Pengembangan manajemen Pemasaran dan Promosi Industri
 - 3) Pembinaan dan Bimbingan Industri Rumah Tangga dan Industri Kecil Menengah

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif, dimana penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian dimana dalam meneliti, status kelompok manusia, suatu kondisi, suatu pemikiran maupun suatu kelas Usaha Kecil Menengah sekarang. Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau tulisan secara sistematis, faktual serta akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang sudah diselidiki dengan ciri :

a. Berusaha untuk menggambarkan konsep dan menghimpun fakta dengan

cara menggambarkan atau melukiskan keadaan obyek atau subyek

b.Data yang dikumpulkan disusun, dianalisis dan digambarkan dalam bentuk tulisan.³¹

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini diadakan pada kantor Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul dengan tujuan karena penulis ingin mengetahui sejauh mana strategi yang digunakan oleh Kabupaten Bantul dalam upaya meng

Sedangkan alasan penulis dalam memilih lokasi penelitian di Kabupaten Bantul karena di Kabupaten Bantul memiliki banyak unit unit usaha kecil untuk dikembangkan menjadi sektor andalan guna menunjang perekonomian daerah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha mengumpulkan data yang diperlukan dalam obyek penelitian penulis akan menggunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Interview/Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Dalam wawancara, pertanyaan dan jawaban diberikan secara verbal dan dilakukan dalam keadaan saling berhadapan³². Dalam hal ini peneliti mengadakan wawancara dengan staff pegawai Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten

³¹ Imoh Nazir, Ph.D, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

³² Mulyati, *Metode Penelitian*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hal 112

Bantul untuk mendapatkan informasi dan data yang berhubungan dengan pokok permasalahan peneliti.

b. Observasi

Yakni dengan pengamatan langsung terhadap hal-hal yang berkaitan langsung dengan pokok bahasan penelitian. Dalam hal ini peneliti mengadakan pengamatan terhadap lokasi dan keadaan Dinas Perindustrian perdagangan dan Koperasi di Kabupaten Bantul.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan alat pengumpul data dengan melihat data yang tersedia seperti media massa, serta data yang berhubungan dengan pokok permasalahan peneliti yakni berkaitan dengan Strategi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi dalam pengembangan Usaha Kecil Menengah.

4. Unit Analisis Data

Untuk mengetahui tentang strategi apa yang dilaksanakan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi dalam upaya pengembangan usaha kecil menengah maka peneliti membutuhkan informasi yang akan mendukung dalam memperoleh data sebagai obyek peneliti. Adapun obyek peneliti itu adalah :

- a. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi.
- b. Pelaku industri kecil.

5. Teknik Analisis Data

Tujuan dari analisis data pada dasarnya adalah m
data dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami

menyusun data agar dapat ditafsirkan melakukan analisa adalah pekerjaan yang sulit, memerlukan kerja keras, daya kreatif, serta intelektual yang tinggi.³³

Dari penjelasan diatas nampak jelas bahwa tidak ada satu cara atau metodepun yang dapat dijadikan pegangan dalam menganalisa data yang terkumpul. Oleh karena itu dalam penelitian ini, penyusun akan menggunakan model analisa kualitatif yaitu usaha mengambil kesimpulan berdasarkan pemikiran logis atas berbagai data yang di peroleh dalam menganalisa data tersebut, penyusun menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari data sekunder diketik dalam bentuk uraian terinci, uraian ini akan terus menerus bertambah dan menambah kesulitan bila tidak segera dianalisis sejak semula. Uraian itu perlu direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok difokuskan pada hal-hal yang penting lalu cari polanya. Jadi uraian dalam data sekunder sebagai bahan mentah disingkatkan, disusun lebih sistematis, ditonjolkan pokok-pokok yang penting, sehingga lebih mudah dikendalikan. Data yang direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang masalah tersebut, juga mempermudah penyusun untuk mencari kembali data yang diperoleh bila diperlukan. Reduksi data dapat pula membantu dalam memberikan pada aspek-aspek

b. Kesimpulan dan verifikasi

Untuk mengambil kesimpulan dan verifikasi dari awal penyusun sudah berusaha untuk mencari makna data yang dikumpulkan. Dengan demikian perlu mencari tema hubungan persamaan hal-hal yang timbul, jadi dari data yang diperoleh penyusun akan berusaha mengambil kesimpulan. Untuk mengakuratkan kesimpulan, maka bertambahnya data yang diperoleh maka senantiasa diverifikasikan selama penelitian berlangsung. Verifikasi dapat diusahakan sesingkat mungkin mengingat kemampuan waktu, biaya yang dimiliki penyusun sangat terbatas,

Kedua macam langkah analisa diatas, senantiasa saling berhubungan dan berlangsung terus selama penelitian dilakukan. Jadi analisa data dalam penelitian ini sebenarnya sudah berlangsung secara kontinuu dari awal sampai akhir